

**PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP
PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

¹Ikhwani Ratna ²Hidayati Nasrah
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Email: weni_27@ymail.com

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait Pengelolaan keuangan daerah dan penerapan SAKIP pada Pemerintah Provinsi Riau. Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang berjumlah 366 orang. Sedangkan jumlah sampel diambil dengan menggunakan rumus dari slovin dan diperoleh sampel sebanyak 78 orang. Data diperoleh menggunakan kuesioner, dengan menggunakan skala likert. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier sederhana yang digunakan untuk melihat pengaruh satu variabel independen (Pengelolaan Keuangan) terhadap satu variabel dependen (Penerapan SAKIP). Untuk mengetahui pengaruh variable independen terhadap variable dependen digunakan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Riau berada pada kategori baik. Begitu juga dengan Penerapan SAKIP juga berada pada kategori baik. Hasil pengujian hipotesis dengan uji F, menghasilkan F hitung > dari pada F tabel ($53,746 > 3,04$). Maka dapat disimpulkan bahwa secara statistic variable Pengelolaan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Penerapan SAKIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Ini berarti setiap terjadi kenaikan terhadap Pengelolaan Keuangan daerah, maka akan menambah Penerapan SAKIP, dan begitu juga sebaliknya setiap terjadi penurunan pengelolaan Keuangan Daerah, maka akan berdampak kepada menurunnya Penerapan SAKIP.

Kata Kunci : Keuangan, akuntabilitas

¹ Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

² Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi birokrasi yang dijalankan oleh pemerintah Republik Indonesia saat ini menjadi agenda yang penting untuk didukung oleh segenap pihak baik dari unsur aparatur negara maupun warga negara. Karena keberhasilan dalam reformasi birokrasi akan dapat membentuk pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Dengan demikian maka kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan semakin tinggi sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan menghasilkan kinerja yang baik secara signifikan dan akhirnya dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD.

Hasil dari penerapan SAKIP di instansi Pemerintah dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Di dalam LAKIP tersebut memuat hasil kinerja pemerintah dalam penggunaan anggaran selama setahun dan mengungkapkan pencapaian target yang telah ditetapkan oleh pemerintah selama setahun baik dari sisi program, output dan outcome yang dihasilkan oleh pemerintah.

LAKIP yang disusun oleh pemerintah merupakan himpunan dari LAKIP Satuan Kerja (Satker) yang berada dilingkungan lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah. Sesuai dengan PP

No. 29 Tahun 2014 yang melakukan evaluasi terhadap LAKIP Satker pada pemerintah pusat dan daerah adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang berada di bawah Inspektorat masing-masing instansi/ lembaga. Sedangkan untuk penilaian terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah baik pusat maupun daerah dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Dari penilaian yang dilakukan terhadap akuntabilitas kinerja tersebut, Pemerintah Provinsi Riau sebagai salah satu dari Pemerintah Provinsi di Indonesia yang dinilai akuntabilitas kinerjanya oleh KemenpanRB menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Dimana selama 3 tahun berturut-turut sejak Tahun 2012 s/d 2014 nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Riau adalah CC yang berarti berada pada kategori cukup baik dan perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar (kemenpanrb, 2016).

LAKIP Pemerintah Provinsi Riau merupakan himpunan dari LAKIP yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di bawah Pemerintah Provinsi Riau. Maka dengan demikian penilaian yang diberikan oleh Menpan RB terhadap LAKIP Pemprov. Riau juga menjadi gambaran terhadap

kinerja SKPD yang berada di bawah Pemprov. Riau. Akuntabilitas kinerja yang dihasilkan oleh SKPD akan menjadi tolok ukur dari keberhasilan pemerintahan yang dijalankan selama ini. Apabila kinerja SKPD yang berada di lingkungan Pemprov. Riau tidak baik maka akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat Riau itu sendiri. Karena anggaran daerah yang tertuang dalam APBD Pemprov. Riau tentu tidak akan dapat memberikan efek yang signifikan kepada masyarakat apabila SKPD sebagai pihak yang mengelola anggaran tersebut tidak dapat merealisasikan APBD tersebut melalui program pembangunan dan sasaran yang telah disusun sebelumnya dengan baik.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah adalah Pengelolaan Keuangan daerah (Abdul, 2009). Pengelolaan Keuangan daerah menurut PP No. 58 Tahun 2005 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Untuk melihat baik atau buruknya Pengelolaan Keuangan daerah dapat dilihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Karena menurut amanah UU No. 15 Tahun

2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah BPK.

LHP yang dibuat oleh BPK berupa opini terhadap Laporan Keuangan

Pemerintah merupakan gambaran terhadap Pengelolaan Keuangan pemerintah saat ini. Untuk melihat bagaimana opini BPK terhadap Laporan Keuangan pada TA 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2014

Jenis Laporan Keuangan	Opini							
	WTP	%	W DP	%	T W	%	T M P	%
LKPP	0	0%	1	10 0%	0	0%	0	0%
LKKL	64	74 %	19	22 %	0	0%	3	4%
LKPD	153	34 %	27 6	60 %	9	2%	19	4%
LK Badan Lainnya	9	60 %	5	33 %	0	0%	1	7%

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK, 2014

Keterangan :

LKPP = Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

LKKL = Laporan Keuangan Kementerian Lembaga

LKPD = Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

WTP = Wajar Tanpa Pengecualian

WDP = Wajar Dengan Pengecualian

TW = Tidak Wajar

TMP = Tidak Menyatakan Pendapat

Jika dilihat pada tabel diatas, opini Pemerintah terhadap LKPD sebagian besar berada pada posisi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yakni sebesar 60 % dari total 457 Pemerintah Daerah. Hal ini berarti masih terdapat pengecualian terhadap kewajaran laporan keuangan pada beberapa bagian laporan. Opini ini menjadi indikasi bahwa masih terdapat masalah terhadap Pengelolaan Keuangan daerah.

Fenomena yang penulis temukan di Provinsi Riau terkait Pengelolaan Keuangan daerah, baik dari sisi perencanaan hingga realisasi juga ditemukan masalah. Hal ini bisa dilihat dari keterlambatan pengesahan APBD TA 2016 oleh DPRD menjadi indikasi dari masih lemahnya pengelolaan dari sisi perencanaan (www.riau.go.id, 2016). Selain itu, realiasi terhadap APBD Provinsi Riau TA 2015 juga menjadi yang terendah di Indonesia yaitu sebesar 59,6 %.Selain Riau, empat lainnya dengan serapan APBD terendah adalah Provinsi Kalimantan Utara tercatat 66,8 persen,

DKI Jakarta sebesar 68,2 persen, Maluku Utara 78,1 persen dan Banten 78,7 persen," kata Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Subagyo di Pekanbaru (www.antarariau.com , 2016).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa perlu dilakukan sebuah penelitian terkait penerapan SAKIP dan Pengelolaan Keuangan daerah di Provinsi Riau. Dengan melihat fenomena terhadap rendahnya penilaian LAKIP Provinsi Riau selama 3 tahun berturut-turut dan Pengelolaan Keuangan daerah yang kurang

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau ?
2. Bagaimana Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau ?
3. Bagaimana Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemprov. Riau ?

C. Manfaat Penelitian

- A. Sebagai masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah

maksimal, maka penulis melihat bahwa ada keterkaitan antara SAKIP dan Pengelolaan Keuangan daerah. Untuk itu diperlukan kajian yang lebih mendalam guna menjadi bahan masukan untuk Pemerintah Provinsi Riau agar dapat menghasilkan kinerja yang baik. Maka dari pada itu penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau”**.

Provinsi Riau dalam mewujudkan kinerja yang lebih baik

- B. Untuk memberikan gambaran ilmiah terhadap pencapaian kinerja pemerintah terkait Pengelolaan Keuangan daerah dan penerapan sistem akuntabilitas instansi pemerintah di lingkungan Pemprov. Riau
- C. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang administrasi keuangan negara.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian SAKIP

Dalam Modul Pembentukan Auditor Ahli yang berjudul *Akuntabilitas Instansi Pemerintah* yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, dikatakan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian proses yang sistematis dari berbagai komponen, alat, dan prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan manajemen kinerja, yaitu perencanaan, penetapan kinerja dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah wujud nyata penerapan akuntabilitas di Indonesia. Inpres ini mendefinisikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan misi dan visi instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui seperangkat indikator kinerja. Dalam konteks AKIP ini, instansi pemerintah diharapkan dapat menyediakan informasi

kinerja yang dapat dipahami dan digunakan sebagai alat ukur keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi (LAN, 2004, hal. 63).

2. Prinsip-prinsip Pelaksanaan SAKIP

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, pelaksanaan SAKIP harus berdasarkan antara lain pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.
- b. Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
- d. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.

- e. Jujur, objektif, transparan, dan akurat.
- f. Menyajikan keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam Modul Pembentukan Auditor Ahli yang berjudul *Akuntabilitas Instansi Pemerintah* yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, dikatakan bahwa selain prinsip-prinsip tersebut di atas, agar pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih efektif, sangat diperlukan komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab di bidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Siklus SAKIP

Menurut Rasul (2003), siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada dasarnya berlandaskan pada konsep manajemen berbasis kinerja. Adapun tahapan dalam siklus manajemen berbasis kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan perencanaan strategis yang meliputi penetapan visi dan misi organisasi dan *strategic performance objectives*.
- b. Penetapan ukuran-ukuran kinerja atas perencanaan strategis yang telah

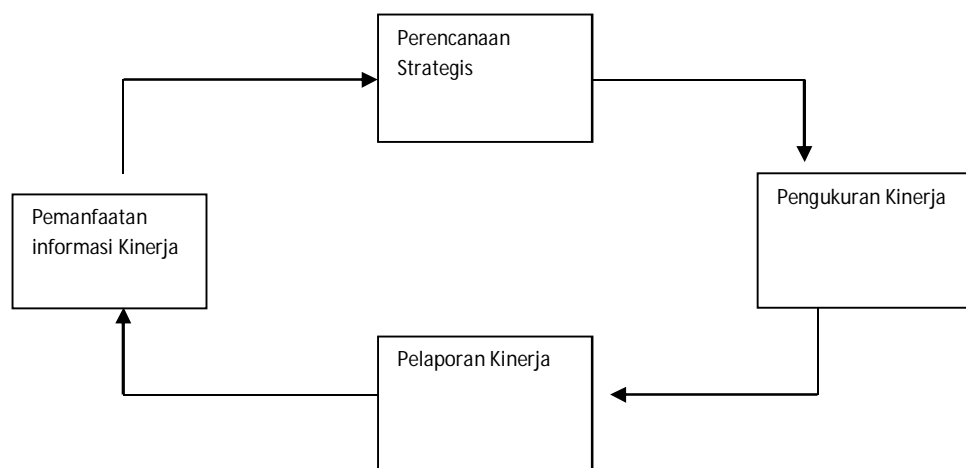
ditetapkan yang diikuti dengan pelaksanaan kegiatan organisasi.

- c. Pengumpulan data kinerja (termasuk proses pengukuran kinerja), menganalisisnya, mereviu, dan melaporkan data tersebut.
- d. Manajemen organisasi menggunakan data yang dilaporkan tersebut untuk mendorong perbaikan kinerja, seperti melakukan perubahan-perubahan dan koreksi-koreksi dan/atau melakukan penyelarasan (*fine-tuning*) atas kegiatan organisasi. Begitu perubahan, koreksi, dan penyelarasan yang dibutuhkan telah ditetapkan, maka siklus akan berulang lagi.

Menurut Wakhyudi *et al.* (2007:10), sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Penerapan perencanaan strategi.
- b. Pengukuran kinerja.
- c. Pelaporan kinerja.
- d. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1

Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber: Wakhyudi, 2007

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dimulai dari penyusunan perencanaan strategi (renstra) yang meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran serta menetapkan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Perencanaan strategi ini kemudian dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan yang dibuat setiap tahun.

Rencana kinerja ini mengungkapkan seluruh target kinerja yang ingin dicapai (*output* dan *outcome*) dari seluruh sasaran strategi dalam tahun yang bersangkutan serta strategi untuk mencapainya. Rencana kinerja ini

merupakan tolok ukur yang akan digunakan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk suatu periode tertentu. Setelah rencana kinerja ditetapkan, tahap selanjutnya adalah pengukuran kinerja. Dalam pelaksanaan kegiatan, dilakukan pengumpulan dan pencatatan data kinerja.

Data kinerja tersebut merupakan capaian kinerja yang dinyatakan dalam satuan indikator kinerja. Dengan diperlukannya data kinerja yang akan digunakan untuk pengukuran kinerja, maka instansi pemerintah perlu mengembangkan sistem pengumpulan data kinerja, yaitu tatanan, instrumen, dan

metode pengumpulan data kinerja. Pada akhir suatu periode, capaian kinerja tersebut dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan atau yang meminta dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Tahap terakhir, informasi yang termuat dalam LAKIP tersebut dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja instansi secara berkesinambungan.

D. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengertian Pengelolaan Keuangan daerah menurut PP 58 tahun 2005 adalah sebagai berikut :“Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup pada daerah,dengan mengacu kepada perundang-undangan tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian

kewenangan antara pemerintah dan daerah. Sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan pada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Darise (2006:21) mengemukakan:“Di dalam undang-undang mengenai keuangan negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan Pengelolaan Keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan Pengelolaan Keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan pada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan daerah, yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggungjawab atas Pengelolaan Keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah”.

Pengelolaan Keuangan daerah tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dari pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut, maka tahapan yang harus dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Pengelolaan keuangan Daerah

Yang harus diperhatikan dalam perencanaan adalah :

a. Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai.

b. Penetapan prioritas kegiatan dan perhitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah dibawah koordinasi sekretaris daerah. Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggungjawab, terlaksananya mekanisme checks and balances serta untuk mendorong upaya

peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintah.

3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa a). Laporan Realisasi Anggaran b). Neraca c). Laporan Arus Kas dan d). Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Sebelum dilaporkan

4. Pengawasan

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang -undangan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian sosial sesuai dengan tujuan untuk melihat dan menjelaskan pengaruh dari beberapa variabel independen terhadap variabel dependen, maka penelitian ini bersifat eksplanatif riset. Metode pengolahan data adalah kuantitatif dengan jenis data yang bersifat *cross sectional data*. *Cross sectional data* adalah pengukuran variabel terkait dan variabel bebas dalam waktu yang bersamaan (Notoatmodjo,2005).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada Lingkungan Pemprov Riau berjumlah 50 SKPD, alasan dipilihnya Pemprov Riau karena terdapat indikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan daerah dan penerapan SAKIP.

Selain itu alasan peneliti memilih Pemerintah Provinsi Riau karena penulis ingin mengetahui sejauh mana pengaruh dari Pengelolaan Keuangan daerah terhadap SAKIP yang diterapkan pada SKPD di Pemprov Riau. Dan memberi masukan terhadap Pemprov Riau agar dapat memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerapan SAKIP.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah suatu kelompok dari elemen penelitian, (unit terkecil) yang merupakan sumber dari data yang diperlukan dalam analisa (Mudrajat Kuncoro, 2003). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat eselon II dan III yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Dari data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau jumlah pejabat eselon II adalah sebanyak 61 dan yang

menduduki jabatan eselon III sebanyak 305 orang yang tersebar di seluruh SKPD di lingkungan Pemprov. Riau. Jadi jumlah keseluruhan populasi adalah sebanyak 366 orang

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Arikunto, 2006). Pengambilan sampel dilakukan secara acak. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah: (1) pegawai tetap, dan (2) sedang menjabat Eselon II, III, IV dan staf (3) termasuk pengelola keuangan dan Tim Pembuat LAKIP pada SKPD . Dalam sampel diambil secara acak.

Adapun untuk menentukan ukuran sample menggunakan rumus Slovin (Riduwan dan Akdon, 2006:249), sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{(N.d^2) + 1} = \frac{365}{(365 \times 10\%^2) + 1} =$$

78 orang

dimana :

n : Jumlah sample

N : Jumlah populasi

d : Persen kesalahan yang ditolerir

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpul langsung dari sumber penelitian atau lapangan yang diperoleh melalui pengamatan dan pencatatan secara cermat di SKPD Pemerintah Provinsi Riau. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari kuisisioner yang disebar kepada Kepala SKPD dan pejabat eselon

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara :

1. Penelitian kepustakaan

Adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui buku, jurnal, surat kabar dan media lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini

2. Penelitian Lapangan

Adalah pengumpulan data yang dilakukan dilapangan untuk mengetahui dan memperoleh langsung data yang peneliti perlukan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui :

a. Kuisisioner.

Kuisisioner adalah pengumpulan data dengan memberikan daftar pernyataan

III yang ada lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari catatan, dokumen yang ada di SKPD Pemerintah Provinsi Riau. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data bagian kepegawaian di SKPD Pemerintah Provinsi Riau.

kepada responden. Dimana pernyataan yang diajukan berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan skala. Skala adalah kumpulan pertanyaan-pertanyaan sikap yang ditulis, disusun dan dianalisis sedemikian rupa sehingga respon individu terhadap pernyataan tersebut dapat diberi skor dan kemudian dapat diinterpretasikan (Azwar, 2003 : 24). Jumlah alternatif respon yang ada dalam skala Likert ada 5 jenis (sangat setuju, setuju , ragu-ragu, tidak setuju, sangat setuju).

b. Wawancara

Wawancara adalah mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten dan mempunyai kaitan erat dengan objek penelitian guna memperoleh informasi

yang akurat dan lengkap. Wawancara dilakukan dengan tetap berpedoman kepada daftar kuesioner yang telah disusun. Hal ini dilakukan untuk mengurangi bias hasil penelitian akibat tidak dimengertinya maksud dari pertanyaan kuisisioner

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data dan informasi dengan cara memanfaatkan sejumlah dokumen tertulis berupa laporan dan peraturan serta literatur-literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linear. Regresi Linear adalah Metode Statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara Variabel Faktor Penyebab (X) terhadap Variabel Akibatnya. Faktor Penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan Predictor sedangkan Variabel Akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan Response. Regresi Linear Sederhana atau sering disingkat dengan SLR (Simple Linear Regression) juga

merupakan salah satu Metode Statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang karakteristik kualitas maupun Kuantitas. Model analisa Regresi linear dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + bX + e$$

Dimana :

Y = Penerapan SAKIP

α = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X = Pengelolaan Keuangan Daerah

E = Error

Dalam pengolahan data penelitian, penulis menggunakan aplikasi SPSS 19.

F. Hasil Penelitian

Dalam bab ini penulis menyajikan laporan hasil penelitian dari data tentang pengaruh pengelolaan Keuangan daerah terhadap Penerapan SAKIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Data tersebut adalah data primer yang diperoleh dari hasil kuesioner dan wawancara dan obeservasi.

Dalam penelitian ini penulis mengambil responden penelitian dari pegawai yang ada di Lingkungan Pemprov

Riau yang bertugas sebagai pengelola keuangan dan tim pembuat LAKIP pada lingkungan Pemprov. Riau.

1. Identitas Responden

Responden penelitian diambil dari Pegawai yang bekerja di Pemerintah Provinsi Riau sebanyak 78 orang. Data penelitian yang diperoleh dari jawaban yang dikumpulkan dari 78 orang responden yang menjadi sampel

Tabel 3. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persen (%)
Laki-laki	58	74,36
Perempuan	20	25,64
Jumlah	78	100

Sumber :Hasil Olahan Data Lapangan Tahun 2016

Hal ini berarti jumlah pegawai yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak daripada pegawai yang berjenis kelamin laki-laki. Hal ini juga turut berpengaruh terhadap Penerapan SAKIP,

Tabel 4. Distribusi Responden Berdasarkan Usia

penelitian. Biodata responden pada kuesioner yang disebar terdiri atas nama, jenis kelamin, usia, jenis pekerjaan, pendidikan dan lama bekerja.

a. Jenis Kelamin Responden

Hasil penelitian berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah responden yang paling banyak berjenis kelamin laki-laki 60% sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 40 %.

karena pegawai laki-laki lebih sedikit memiliki hak cuti dibandingkan pegawai perempuan, sehingga waktu yang dimiliki juga dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kinerja dalam penerapan SAKIP.

b. Usia Responden

Distribusi responden menurut usia secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.2.sebagian besar responden berusia antara 31 – 40 tahun yaitu sebesar 58,9%. Kemudian disusul dengan kelompok umur 18 s/d 30 sebesar 36 % dan usia > 45 sebesar 17 %

Usia (tahun)	Frekuensi	Persen (%)
--------------	-----------	------------

20-30	13	16,7
31-40	46	58,9
41-50	12	15,4
> 51	7	8,9
Jumlah	78	100

Sumber :Hasil Olahan Data Lapangan

Tahun 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai yang paling banyak adalah pada kelompok umur 31 s/d 40.

Tabel 5. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persen (%)
SMA	7	8,9
D3	2	2,5
S1	52	66,7
S2	17	21,8
Jumlah	78	100 %

Sumber :Hasil Olahan Data Lapangan

Tahun 2016

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi. Tingkat pendidikan yang tinggi dapat berdampak positif kepada organisasi. Karena pegawai yang

Secara kinerja hal ini dianggap lebih menguntungkan karena pegawai memiliki pengalaman kerja yang cukup banyak dan juga masih kuat untuk melaksanakan pekerjaan yang berat.

c. Pendidikan Responden

Hasil penelitian tentang pendidikan responden menunjukkan sebagian besar responden sudah mempunyai pendidikan S1 (41%), diikuti dengan SMA (36,5%) dan S2 (17,34%) serta D3 (15).

memiliki pendidikan yang tinggi cenderung memiliki kemampuan yang baik sehingga dapat membantu dalam pencapaian tujuan organisasi.

2. Deskripsi Hasil Penelitian

a. Tanggapan Responden Penelitian terhadap Variabel Independen Pengelolaan Keuangan (X) di Pemerintah Provinsi Riau.

Dalam rangka untuk meningkatkan Penerapan SAKIP, dibutuhkan pengelolaan keuangan yang memadai untuk dilaksanakan oleh semua unsur organisasi untuk dapat mencapai tujuan organisasi. Dengan adanya Pengelolaan keuangan yang memadai maka semua pegawai akan lebih

termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Maka penelitian yang penulis lakukan adalah melihat bagaimana pengaruh Pengelolaan Keuangan daerah terhadap Penerapan SAKIP Pemerintah Provinsi Riau. Sebagai variabel independen adalah Pengelolaan Keuangan yang terdiri dari 5 indikator yaitu : perencanaan keuangan, pelaksanaan keuangan, penatausahaan keuangan, Pelaporan keuangan dan pengawasan. Untuk mengukur sejauh mana Pengelolaan Keuangan yang ada di Pemerintah Provinsi Riau ,penulis mengajukan kuesioner kepada

responden yang diambil dari 78 orang responden di Pemerintah Provinsi Riau. Penulis membuat pertanyaan yang diajukan untuk variabel Pengelolaan Keuangan seluruhnya berjumlah 13 pertanyaan. Masing-masing pertanyaan dioperasionalisasikan ke dalam 5 indikator tersebut. Berdasarkan pada hasil jawaban responden dari masing-masing-masing indikator Pengelolaan Keuangan diatas, maka untuk melihat hasil nilai rata-rata skor secara keseluruhan dapat dilihat pada rekapitulasi distribusi jawaban dari responden berikut ini :

Tabel 6: Rekapitulasi Distribusi Responden Variabel Bebas X

No	Indikator	Jumlah Responden	Skor	Kategori
1	Perencanaan	78	1175	Baik
2	Pelaksanaan	78	290	Baik
3	Penatausahaan	78	636	Baik
4	Pelaporan	78	308	Baik
5	Peratanggungjawaban	78	634	Baik
6	Pengawasan	78	932	Baik
Total Skor		3975		
Kategori		Baik		

Sumber : Hasil pengolahan data dan hasil survey tahun 2016

Dari tabel rekapitulasi diatas berdasarkan tanggapan responden dari

indikator-indikator yang telah ditetapkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan indikator dan item pertanyaan yang ditanggapi responden memperoleh total skor 4885 dikategorikan baik. Hal ini berarti Pengelolaan Keuangan di Pemerintah Provinsi Riau sudah baik. Hasil ini bertolak ukur pada pelaksanaan Pengelolaan Keuangan di pemerintah Provinsi Riau telah mempertimbangkan indikator-indikator yang ditetapkan oleh para ahli.

b. Tanggapan Responden Penelitian terhadap Variabel Dependen Penerapan SAKIP (Y) di Pemerintah Provinsi Riau.

Tingkat Penerapan SAKIP merupakan salah satu indikator dari keberhasilan kerja pemerintah. Karena penilaian terhadap LAKIP yang dilakukan oleh Kemenpan RB merupakan rapor dari kinerja Pemda dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Maka pada penelitian ini yang penulis lakukan adalah melihat bagaimana Penerapan SAKIP yang dihasilkan pada Pemerintah Provinsi Riau. Sebagai variabel dependen adalah Penerapan SAKIP yang terdiri dari 5 indikator yaitu : Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja,

Pelaporan kinerja, Evaluasi internal dan capaian kinerja . Untuk mengukur sejauh mana Penerapan SAKIP yang ada di Pemerintah Provinsi Riau, penulis mengajukan kuesioner kepada responden yang diambil dari 78 orang pegawai Pemerintah Provinsi Riau. Penulis membuat pertanyaan yang diajukan untuk variabel kinerja seluruhnya berjumlah 13 pertanyaan. Masing-masing pertanyaan dioperasionalisasikan ke dalam 5 indikator tersebut.

Berdasarkan pada hasil jawaban responden dari masing-masing-masing indikator Penerapan SAKIP diatas, maka untuk melihat hasil nilai rata-rata skor secara keseluruhan dapat dilihat pada rekapitulasi distribusi jawaban dari responden berikut ini :

Tabel 7 : Rekapitulasi Distribusi Responden Terhadap Variabel Y

No	Indikator	Jumlah Responden	Skor	Kategori
1	Perencanaan kinerja	78	948	Baik
2	Pengukuran kinerja	78	884	Baik
3	Pelaporan kinerja	78	920	Baik
4	Evaluasi internal	78	615	Baik
5	Capaian Kinerja	78	610	Baik
Total Skor		3977		
Kategori		Baik		

Sumber : Hasil Pengolahan Data dan Hasil Survey Tahun 2016

Dari tabel rekapitulasi diatas berdasarkan tanggapan responden dari indikator-indikator yang telah ditetapkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan indikator dan item pertanyaan yang ditanggapi responden memperoleh total skor 3977 dikategorikan baik. Hal ini berarti Penerapan SAKIP di Pemerintah Provinsi Riau sudah baik.

Hasil ini bertolak ukur pada jawaban responden terhadap indikator penerapan SAKIP yang diberikan. Walaupun masih diperlukan perbaikan untuk lebih meningkatkan Penerapan SAKIP di Pemerintah Provinsi Riau.

Tabel 8
Hasil Uji Regresi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	20.962	4.100		5.113	.000
Pengelolaan Keuangan	.587	.080	.644	7.331	.000

a. Dependent Variable: SAKIP

Dengan memperhatikan tabel di atas, maka dapat diperoleh persamaan jalur, yaitu :

$$Y = 20,962 + 0.587 X + e$$

Dimana :

Y = Penerapan SAKIP

X₁ = Pengelolaan Keuangan

Tabel 9
Hasil Uji F

3. Hasil Uji Regresi Linear

Hasil pengujian Regresi melalui software SPSS 17 diperoleh hasil sebagai berikut :

E = error

Berdasarkan persamaan tersebut pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tercermin dari koefisien regresi. Pengaruh Pengelolaan Keuangan sebesar 58,7 satuan. Dari persamaan tersebut juga dapat diartikan bahwa setiap peningkatan pengelolaan Keuangan sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan (karena nilainya positif) Penerapan SAKIP sebesar sebesar 58,7 satuan.

4. Uji Hipotesis

a. Uji F

Dengan kriteria pengambilan keputusan : terima H₀ jika F_{hitung} > F_{tabel} pada α = 5% dan tolak H₀ (H_a diterima) jika F_{hitung} < F_{tabel} pada α = 5%.

Hasil uji serempak dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Significance
1 Regression	75.1207	1	75.1207	53.746	.000 ^a
Residual	1062.41	7	151.773		
Total	1137.53	8			

a. Predictors:
(Constant),
Pengelolaan Keuangan

b. Dependent
Variable: SAKIP

Sumber : Hasil perhitungan SPSS

Dari tabel diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 53,746 dengan nilai signifikansi 0,000. Sedangkan nilai F_{tabel} pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha=0,05$) maka nilai F_{tabel} (3,04) Dengan demikian $F_{hitung} > F_{tabel}$

b. Uji Koefisien Determinasi

tabel, yaitu $53,746 > 3,04$ Oleh karena itu H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti bahwa Pengelolaan Keuangan secara simultan berpengaruh terhadap Penerapan SAKIP pada Pemerintah Provinsi Riau. Hal ini dapat dilihat juga dari nilai signifikansi pada uji F yaitu 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Maknanya adalah *secara signifikan* menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan secara simultan berpengaruh sangat nyata terhadap penerapan SAKIP Pemerintah Provinsi Riau. Jika variabel tersebut bertambah secara simultan, maka akan dapat meningkatkan penerapan SAKIP pada Pemerintah Provinsi RiauProvinsi Riau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jawaban responden terhadap kuisioner masing-masing variabel berada pada kategori baik. Responden menilai bahwa Pemerintah Provinsi Riau telah memenuhi indikator-indikator yang diajukan pada tiap variabel, sehingga hal ini berpengaruh terhadap hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel Pengelolaan Keuangan secara simultan berpengaruh terhadap Penerapan SAKIP pada Pemerintah Provinsi Riau.

Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS, diperoleh hasil koefisien determinasi sebagai berikut :

Tabel 10
Hasil uji Koefisien determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.644 ^a	.414	.407	3.73856

a. Predictors: (Constant), Pengelolaan Keuangan

b. Dependent Variable: SAKIP

Koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel adjusted R square, sebesar 0,407 menunjukkan bahwa kontribusi dari Pengelolaan Keuangan terhadap Penerapan SAKIP sebesar 40,7%, sisanya sebesar 59,3 % penerapan SAKIP pada Pemerintah Provinsi Riau Provinsi Riau ditentukan faktor lain.

G. Hasil Pembahasan

Hasil pengujian yang dilakukan terhadap kuesioner yang disebarkan kepada 78 orang responden yang dijadikan sample pada penelitian ini, menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan di Pemerintah Provinsi Riau sudah berada pada kategori baik. Dimana diantara 6 indikator yang diuji melalui 13

pertanyaan pada kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar responden menjawab dengan jawaban baik terhadap kuesioner yang diajukan. Begitu juga dengan pengujian yang dilakukan terhadap Penerapan SAKIP pada Pemerintah Provinsi Riau, menunjukkan bahwa Penerapan SAKIP Pemerintah Provinsi Riau sudah berada pada kategori baik. Dimana diantara 5 indikator yang diuji melalui 13 pertanyaan pada kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar responden menjawab dengan jawaban baik terhadap kuesioner yang diajukan.

Hasil pengujian statistik dengan metode regresi linear sederhana melalui aplikasi SPSS ini menunjukkan bahwa variabel Pengelolaan Keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerapan SAKIP pada Pemerintah Provinsi Riau. Hal ini berarti untuk memperbaiki penerapan SAKIP Pemerintah Provinsi Riau dapat dilakukan dengan meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik maka tujuan organisasi akan tercapai dengan baik juga, karena semua komponen organisasi bergerak bersama-sama menjalankan program kegiatan secara efektif, efisien dalam mencapai tujuan entitas, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset

negara, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dengan demikian akan mendukung peningkatan kinerja dan penerapan SAKIP pada Pemerintah Provinsi Riau.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan fenomena yang dijumpai di Pemerintah Provinsi Riau, dimana hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau memberikan opini WTP pada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau TA 2014. Pada saat itu pada Pemerintah Provinsi Riau juga menjadi beberapa Satker yang diperiksa oleh BPK. Dimana Pengelolaan Keuangan juga menjadi salah satu indikator yang turut berpengaruh terhadap opini yang diberikan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau. Karena Pengelolaan Keuangan yang berjalan dianggap sudah memadai, maka opini yang diberikan oleh BPK bisa memperoleh hasil WTP.

Hasil pemeriksaan ini juga mendukung terhadap tujuan dari dibentuknya Pengelolaan Keuangan daerah pada PP nomor 58 tahun 2005, dimana Pengelolaan Keuangan diharapkan menjadi langkah konkrit untuk membentuk internal control system artinya pengawasan

by system. Siapapun pemegang amanah birokrasi pemerintahan, maka dengan sendirinya sistem yang akan melakukan pengawasan guna mencapai visi, misi dan tujuan organisasi dalam arti sempit dan mencapai visi, misi dan tujuan bernegara dalam arti seluas-luasnya sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya.

Ketika internal control system yang dijabarkan dalam Pengelolaan Keuangan bekerja secara otomatis melakukan fungsi pengawasan, maka setiap insan birokrasi pemerintah suka tidak suka akan bekerja “under control” /dibawah pengawasan system yang berlaku. Selanjutnya, apabila kondisi ini dipertahankan maka terciptalah internal control culture, artinya sistem pengendalian intern menjadi bagian dari budaya organisasi pemerintahan di Indonesia.

Pengelolaan Keuangan penting untuk dipahami tidak saja oleh tim pengelola keuangan namun juga ke seluruh komponen pelaku manajemen pemerintahan, seluruh jajaran PNS tanpa terkecuali untuk melindungi agar tidak terjerumus ke dalam salah urus manajemen atau mal adiminsitrasi bahkan “terpeleset” ke ranah Tindak Pidana Korupsi.

Melalui komitmen dan upaya nyata menerapkan Pengelolaan Keuangan daerah secara konsisten dan berkesinambungan, kiranya Pengelola Keuangan menjadi suatu kebutuhan dan bahkan suatu budaya. Efektivitas Pengelola Keuangan sangat ditentukan oleh berhasil tidaknya Pengelola Keuangan menjelma menjadi internal control culture organisasi pemerintahan di Indonesia guna menciptakan good governance dan clean government.

H. Kesimpulan dan Saran

Setelah dilakukan analisis dan pembahasan terhadap hasil penelitian serta pengujian hipotesis sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini dibuat kesimpulan dan saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

1. Kesimpulan

- a. Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Riau. Menurut jawaban responden berada pada kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada

Pemerintah Provinsi Riau telah mempertimbangkan indikator-indikator pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah. Diantaranya Perencanaan Keuangan sudah baik, Pelaksanaan Keuangan sudah baik, Penatausahaan Keuangan sudah baik, Pelaporan sudah baik dan Pertanggungjawaban sudah baik.

- b. Penerapan SAKIP pada Pemerintah Provinsi Riau menurut jawaban responden berada pada kategori baik. Diantaranya adalah perencanaan kinerja sudah baik, pengukuran kinerja sudah baik, Pelaporan kinerja sudah baik, evaluasi internal sudah baik dan capaian kinerja sudah baik. Hal ini menunjukkan bahwa Penerapan SAKIP pada Pemerintah Provinsi Riau yang dilaksanakan oleh pegawai telah menunjukkan hasil yang positif. Namun masih terdapat kelemahan yang butuh perbaikan untuk meningkatkan Penerapan SAKIP tersebut. Diantaranya masih adanya pegawai yang kurang disiplin

dalam pelaksanaan tupoksinya dan jumlah pegawai yang masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang dilayani.

- c. Hasil pengujian yang dilakukandengan menggunakan analisis regresi menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Penerapan SAKIP pada Pemerintah Provinsi Riau. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap penerapan SAKIP pada Pemerintah Provinsi Riau. Semakin baik Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan, maka akan semakin baik penerapan SAKIP pada Pemerintah Provinsi Riau. Sebaliknya semakin buruk Pengelolaan Keuangan Daerah , maka akan semakin rendah pula Penerapan SAKIP pada Pemerintah Provinsi Riau.

2. Saran

- a. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya, diusahakan dengan menggunakan observasi atau

pengamatan langsung kepada objek, atau menggunakan metode eksperimen sebagai pengganti metode kuesioner.

- b. Penelitian ini perlu dikembangkan lebih jauh lagi, untuk mendapatkan hasil empiris yang lebih kuat yaitu dengan menambah variabel lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi Penerapan SAKIP misalnya faktor reward dan punishment, kepemimpinan dan lain-lain.
- c. Kepada Pemerintah Provinsi RiauProvinsi Riau hendaknya mengidentifikasi dan mempertimbangkan faktor-faktor yang turut mempengaruhi Penerapan SAKIP seperti pemberlakuan reward and punishment kepada pegawai, kepemimpinan dan lain-lain, sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Anthony dan Govindarajan. (2002).Sistem Pengendalian Manajemen.Salemba Empat. Jakarta.

- Almanda Primadona. (2013). *Pengaruh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Tesis. Unikom: Bandung
- Askam Tuasikal (2008). *Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah. (Studi Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Maluku)* ISSN:1410-8623.
- Chabib Soleh. 2009. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah* Bandung: Fokus Media.
- Eko Hariyanto. 2005. *Peranan Akuntansi Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Good Governance*.
- Halim, Abdul dan Theresia.2007. *Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi kedua*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN. Ihyaul, Ulum.
2004. *Akuntansi sektor publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Iman Pirman Hidayat (2008). *Peranan Penatausahaan Keuangan Daerah dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan APBD*. ISSN :1907-9958.
- Irvan Saefulloh (2013). *Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Subang*.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mohamad Mahsun. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFPE.
- Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 134 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Umar Husein. 2003. *Metode Riset Perilaku Organisasi*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-undang No.33 Tahun 2004 Tentang *Sumber-Sumber Keuangan Daerah*. Veithzal Rivai. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Wawan Sukmana dan Lia Anggarsari (2009). *Pengaruh Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*.ISSN:1907-9958